



PENGARUSUTAMAAN PARTISIPASI SEMESTA UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU

Elga Andina*

Abstrak

Capaian pendidikan nasional masih menghadapi tantangan serius, mulai dari ketimpangan akses, rendahnya mutu pembelajaran, hingga lemahnya tata kelola kelembagaan. Di tengah kondisi ini, penguatan partisipasi multipihak menjadi strategi kolektif dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan bermutu. Urgensi isu ini tercermin dalam tema peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025, yakni “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, yang menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat hanya dibebankan kepada negara, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana partisipasi semesta telah diarusutamakan dalam kebijakan pendidikan nasional dan mengidentifikasi tantangan struktural dan kultural yang menghalangi terwujudnya pendidikan yang bermutu dan inklusif. Pada hakikatnya, setiap pihak telah berkontribusi sesuai kewenangannya. Namun, minimnya koordinasi, terfragmentasinya data, dan lemahnya akuntabilitas bersama menjadikan kolaborasi antarsektor tidak efektif. Komisi X DPR RI diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memperkuat tata kelola pendidikan inklusif yang berbasis data, meningkatkan respons terhadap kebutuhan lokal, serta mendorong sinergi multipihak secara lebih sistemis dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2025 mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Tema ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan merupakan hasil dari kolaborasi seluruh elemen bangsa (semesta). Namun, harus diakui bahwa capaian pendidikan nasional masih belum memenuhi harapan, bahkan menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan bagi keberlangsungan pembangunan bangsa.

Berbagai tantangan struktural dan kultural terus menghambat upaya perbaikan mutu pendidikan. Ketimpangan akses dan kualitas masih menjadi masalah mendasar, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara Pulau Jawa dan wilayah luar Jawa. Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024 mencatat bahwa indeks integritas pendidikan nasional hanya mencapai skor 69,5 (masuk dalam kategori “korektif”) dengan dimensi tata kelola satuan pendidikan menjadi yang terlemah (Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], 2025). Rapor Pendidikan 2024 juga menunjukkan peningkatan mutu pendidikan belum mencapai target yang diharapkan.

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: elga.andina@dpr.go.id

Salah satu akar persoalan yang belum banyak disoroti secara komprehensif adalah lemahnya sinergi antaraktor dalam ekosistem pendidikan. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, organisasi keagamaan, dan lembaga nonpemerintah dalam pendidikan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi baik dalam kebijakan maupun praktik penyelenggaraan pendidikan. Padahal, penguatan partisipasi multipihak berpotensi memperkuat pengawasan sosial, memperluas inovasi layanan, serta mempercepat pemerataan akses pendidikan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana partisipasi semesta telah diarusutamakan serta mengidentifikasi strategi untuk menjawab tantangan struktural dan kultural yang menghalangi terwujudnya pendidikan yang bermutu dan inklusif.

Peta Ketimpangan Mutu dan Akses Pendidikan

Peta mutu dan akses pendidikan di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan yang mencolok. Rapor Pendidikan 2024 mencatat bahwa 60 persen sekolah dasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) belum mencapai standar minimum literasi. Hal ini tercermin dalam rendahnya performa peserta didik dari wilayah 3T dalam menghadapi soal-soal literasi kompleks pada ujian tulis berbasis komputer (UTBK) 2025, khususnya dalam subtes Bahasa Indonesia yang menguji kemampuan memahami dan menalar teks panjang (Aranditio, 2025).

Secara nasional, 75 persen anak usia 15 tahun memiliki kemampuan membaca di bawah standar minimum *Programme for International Student Assessment* (PISA), dengan capaian yang lebih buruk di wilayah 3T (Mu'ti, 2025). Data Bank Dunia turut memperkuat gambaran ini dengan mencatat bahwa 35 persen siswa sekolah dasar belum mampu membaca dengan baik (Indrastuti, 2024). Bahkan, di daerah seperti Buleleng, Bali, masih ditemukan ratusan siswa SMP yang belum mahir membaca (Hasan & Wadrianto, 2025). Ketimpangan ini juga terlihat dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024, di mana rata-rata lama sekolah di DKI Jakarta mencapai 11,49 tahun, sementara di sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia masih di bawah 8 tahun (Badan Pusat Statistik [BPS], 2024a).

Secara kuantitatif telah terlihat adanya peningkatan angka partisipasi sekolah. Data menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar (APK) pendidikan dasar secara nasional melebihi 100% (BPS, 2024b, hlm. 62), dan angka partisipasi murni (APM) pendidikan menengah juga mengalami kenaikan menjadi 81,73 di tahun 2024 dari 81,35 di tahun 2023 (BPS, 2024b, hlm. 63). Banyak peserta didik yang telah bersekolah, sayangnya mereka belum menguasai keterampilan dasar yang menjadi fondasi pembelajaran. Hal ini tertulis dalam laporan McKinsey & Company (2024) yang menegaskan bahwa perluasan akses belum diikuti peningkatan mutu: semakin banyak anak bersekolah, namun sebagian besar belum memperoleh kecakapan esensial.

Berbagai faktor turut memperparah ketimpangan ini, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kekurangan guru berkualitas, lemahnya pengelolaan pendidikan daerah,

hingga minimnya investasi dalam pengembangan kapasitas pendidik dan dukungan teknologi. Partisipasi masyarakat yang rendah juga menjadi tantangan, yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman peran publik dalam pendidikan dan terbatasnya akses informasi (Dewi & Suriansyah, 2025). Situasi lebih rumit di daerah perdesaan dan tertinggal, di mana fasilitas dan infrastruktur yang minim menghambat keterlibatan aktif warga. Tekanan sosial-ekonomi seperti kemiskinan juga membatasi peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka.

Partisipasi Semesta dalam Pendidikan

Partisipasi semesta dalam konteks pendidikan dapat dimaknai sebagai keterlibatan kolektif seluruh pemangku kepentingan dalam proses pendidikan. Konsep ini dikenal dengan kerangka pentaheliks, yaitu sinergi antara pemerintah, sektor swasta/dunia usaha, masyarakat, media, dan satuan pendidikan.

Pemerintah memegang peran sentral dalam regulasi, pendanaan, dan pengawasan kebijakan pendidikan agar selaras dengan prioritas nasional dan berkeadilan (Husnah *et al.*, 2024; Savandha *et al.*, 2024). Dunia usaha mendukung melalui pendanaan, pelatihan kerja, dan penguatan kurikulum berbasis pasar (Hidayat, 2024), khususnya dalam pendidikan vokasi dan infrastruktur digital seperti kerja sama SMK dengan industri untuk magang dan penyerapan tenaga kerja.

Masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil (OMS), menjembatani aspirasi warga dengan kebijakan pendidikan melalui pengawasan anggaran, advokasi inklusif, dan pendampingan sekolah (KPK, 2025; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2021). Media turut mendorong akuntabilitas dengan mengangkat isu ketimpangan mutu, kekerasan di sekolah, dan korupsi anggaran (Adisaputra, 2023). Satuan pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan program, riset, dan inovasi. Universitas dan sekolah menjadi pusat ilmu dan penyedia tenaga pendidik (Adisaputra, 2023).

Meskipun setiap aktor dalam sistem pendidikan memiliki peran strategis sesuai kerangka pentaheliks, hingga saat ini belum terdapat kebijakan nasional yang secara eksplisit mengarusutamakan pendekatan ini dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Akibatnya, berbagai bentuk kolaborasi yang terbentuk cenderung bersifat sporadis, tidak sistematis, serta sulit diukur kontribusinya terhadap peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

Menjawab Tantangan Struktural dan Kultural

Setiap aktor dalam ekosistem pendidikan telah berkontribusi sesuai kapasitasnya. Namun, kolaborasi multipihak dalam kerangka pentaheliks masih dihadapkan pada tantangan struktural dan kultural yang mendasar, menghambat terciptanya tata kelola pendidikan yang partisipatif dan efektif. Untuk menyelesaikan hambatan tersebut, diperlukan beberapa tindakan strategis.

Pertama, sinergi antara kebijakan pusat dan daerah perlu diperkuat. Meskipun desentralisasi telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah, implementasinya masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, dukungan anggaran yang memadai, serta mekanisme koordinasi vertikal yang lebih konsisten. Upaya harmonisasi regulasi dan integrasi perencanaan antara pusat dan daerah perlu diprioritaskan agar kebijakan lebih kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Kedua, penguatan dialog antarsektor menjadi krusial untuk memastikan kebijakan pendidikan mencerminkan ragam perspektif dan kepentingan. Dunia usaha perlu lebih dilibatkan secara sistematis dalam pengembangan kurikulum, terutama dalam pendidikan vokasi. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai mitra strategis melalui pemanfaatan hasil riset dalam proses perumusan kebijakan. OMS pun sebaiknya diberikan ruang lebih besar untuk berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan.

Ketiga, integrasi sistem data dan pengawasan perlu ditingkatkan agar pengambilan keputusan lebih responsif dan berbasis bukti. Sinkronisasi indikator, metode pelaporan, dan pemanfaatan data lintas sektor dapat memperkuat efektivitas kebijakan serta mendeteksi secara dini permasalahan krusial, seperti kekerasan di sekolah, ketimpangan layanan, dan praktik penyalahgunaan anggaran.

Keempat, diperlukan kerangka akuntabilitas kolektif yang menjembatani tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Penguatan mekanisme evaluasi berbasis hasil, bukan sekadar capaian administratif, akan mendorong pendidikan bergerak menuju transformasi substansial. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga instrumen pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan.

Penutup

Tema Hari Pendidikan Nasional 2025 mengingatkan bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat diwujudkan hanya melalui kerja pemerintah semata. Tantangan struktural dan kultural yang masih dihadapi, yaitu kualitas pembelajaran yang belum merata, ketimpangan akses dan partisipasi, serta lemahnya tata kelola pendidikan yang berintegritas, menunjukkan pentingnya partisipasi semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi multipihak untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang responsif, adaptif, dan berkeadilan.

Dalam konteks ini, Komisi X DPR RI berperan strategis untuk memperkuat fondasi regulasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan secara lebih akuntabel, dan memastikan alokasi anggaran yang berpihak pada pemerataan mutu pendidikan. Rekomendasi utama adalah mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional agar lebih inklusif terhadap peran masyarakat, memperkuat mekanisme pengawasan terhadap program kemitraan pendidikan, serta menjamin keberlanjutan dan distribusi anggaran pendidikan yang adil.

Referensi

- Adisaputra, A. K. (2023). Penta helix collaboration in higher education. *JEMBA: Jurnal of Economics, Management, Business and Accounting*, 1(2), 57–66. <https://doi.org/10.54783/jemba.v1i2.11>
- Aranditio, S. (2025, April 27). Peserta SNPMB keluhkan soal Tes Literasi Bahasa Indonesia. *Kompas.id*. <https://bit.ly/SNPMBLiterasi>
- Badan Pusat Statistik. (2024a, November 15). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2024. *Berita Resmi Statistik*, 85/11/Th. XXVII. https://bit.ly/IPM2024_BRS
- Badan Pusat Statistik. (2024b). *Statistik pendidikan 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Dewi, R. S., & Suriansyah, A. (2025). Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan: studi kualitatif pada sekolah di pedesaan dan perkotaan. *Elementary: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 5(1), 33–43. <https://doi.org/10.51878/elementary.v5i1.4158>
- Hasan, & Wadrianto, G. K. (2025, April 16). Ratusan siswa SMP di Buleleng tak bisa membaca, ada apa? *Kompas.com*. <https://bit.ly/BulelengLiterasi>
- Hidayat. (2024). Synergy of public administration and education in efforts to improve the quality of education in Indonesia. *International Journal of Administration, Business & Organization*, 5(5), 85–92. <https://doi.org/10.61242/ijabo.24.439>
- Husnah, W., Muzakir, M. A. I., Chairu, T., Choiruddin, Ardianti, E. A., Karnadi, & Radiwan. (2024). Strengthening penta helix collaboration for enhancement quality of education. *The International Journal of Education Management and Sociology*, 3(1), 18–26. <https://doi.org/10.58818/ijems.v3i1.93>
- Indrastuti. (2024, September 11). Bank Dunia prapandemi, 35 anak sekolah dasar di Indonesia tidak cakap membaca. *Media Indonesia*. <https://bit.ly/Micakap>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025, April 25). *Temuan hasil SPI Pendidikan 2024: Menyontek dan plagiarisme masih merebak di sekolah dan kampus*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://bit.ly/3RN5WwL>
- McKinsey & Company. (2024, Februari). *Spark & sustain: How school systems can improve learning at scale*. McKinsey & Company.
- Mu'ti, A. (2025, April 29). Arah kebijakan pendidikan bermutu untuk semua [Sambutan]. Dalam *Pembukaan konsolidasi nasional pendidikan dasar dan menengah tahun 2025*. Kanal YouTube Kemendikdasmen. <https://www.youtube.com/live/382Kh5El7s>
- Savandha, S. D., Azzahra, A., & Azzahra, J. (2024). The integrated governance model for improving education quality (IGMEQ): A comparative analysis of Indonesia and Finland systems. *American Journal of Open Research*, 3(5), 1018–1028. <https://doi.org/10.58811/opsearch.v3i5.126>
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://doi.org/10.54675/ASRB4722>